

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara

Sodik Dwi Purnomo, Krisnhoe Sukma Danuta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

*Correspondence email: sodikdwipurnomo@yahoo.com

Abstrak. Kebijakan Otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan performa pembangunan ekonomi daerah, secara umum kebijakan ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi apakah kebijakan tersebut juga mampu menekan kemiskinan di daerah, keadaan tersebut merupakan problem utama penelitian ini, sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), untuk 33 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara dari Periode Tahun 2010-2019. Metode penelitian menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengimplikasikan pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh di semua kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Kemiskinan; Desentralisasi Fiskal; Kemandirian Keuangan Daerah; Pengeluaran Pemerintah

Abstract. *Regional Autonomy Policy is intended to improve the performance of regional economic development, in general this policy can spur regional economic growth, but whether the policy is also able to reduce poverty in the region, this situation is the main problem of this study, so this research is aimed at finding out the influence of regional financial capacity on poverty in regencies / cities in North Sumatra province. The data used are secondary data in the form of panels sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), for 33 districts / cities in North Sumatra province from the period of 2010-2019. The research method uses multiple linear regression. The results showed that ratio of regional financial independence and Degree of Fiscal Decentralization has no significant negative relationship to poverty. Government Expenditure in the Health Sector has a significant negative relationship to poverty. This finding implies that the local government must improve health services as a whole in all districts/cities in North Sumatra Province.*

Keywords: *Poverty; Fiscal Decentralization; Regional Financial Independence; Government Expenditure*

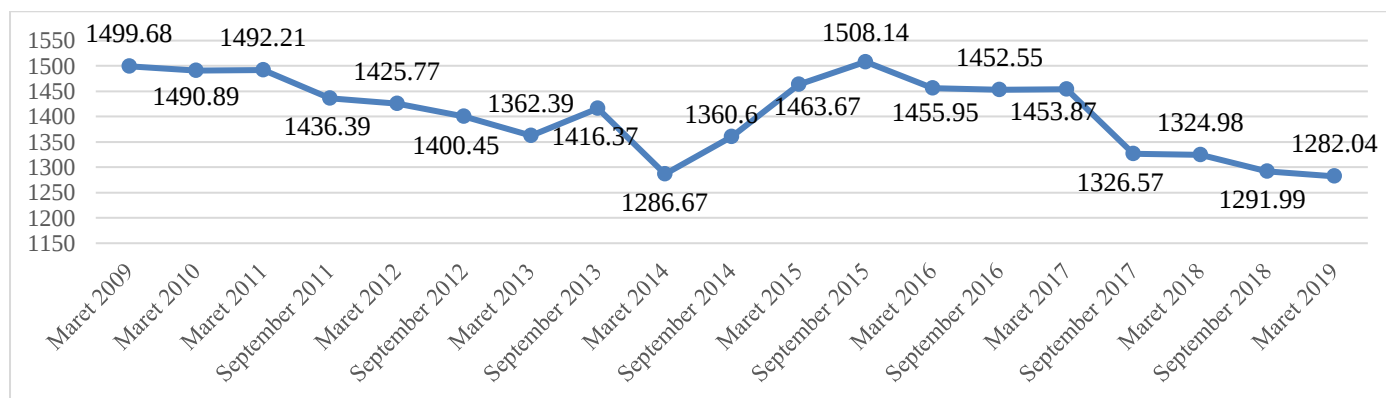
PENDAHULUAN

Munculnya berbagai permasalahan di berbagai daerah dapat berdampak pada hubungan baik antara pemerintah pusat dengan daerah, khususnya terkait dengan aspek keuangan. Oleh karena itu, untuk menyikapi permasalahan tersebut telah di rumuskan kebijakan yang disebut otonomi daerah yang mendorong pemerintah daerah agar lebih inisiatif dan inovatif dalam mengelola kekayaan yang ada di daerah sebagai modal dalam melakukan pembangunan fasilitas publik (Sudewi & Wirathi, 2013). Otonomi daerah membawa kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan keuangan daerahnya dengan lebih baik (Christia & Ispriyarto, 2019), termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum dan dapat mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah. Daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang baik diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi dan bersifat inklusif, artinya dampak pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan kemiskinan akan berkurang secara signifikan (Asmara & Cahaya, 2014). Kemandirian keuangan daerah mengindikasikan bahwa daerah memiliki kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari sisi besar kecilnya penerimaan daerah, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti transfer dari pemerintah pusat ke daerah maupun pinjaman daerah lainnya (Putra & Hidayat, 2016).

Pemerintah Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kebebasan bagi daerah yang disertai dengan sumber daya pada pemerintah daerah untuk melakukan peran alokasi secara mandiri, transparan, akuntabel dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerahnya (Aulia, 2014). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerahnya,

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan daerah meliputi Menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya; Melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan ; Melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, adalah Desentralisasi Politik, Derajat Desentralisasi, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dapat menciptakan kemandirian daerah dalam menjalankan fungsinya dengan dengan baik. Derajat Desentralisasi merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam membangun daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah (Kamaroellah, 2017).

Indikator utama yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu terlihat dari kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan tingkat ketergantungan dari pemerintah pusat yang semakin kecil dan diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Kamaroellah, 2017). Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang memiliki tujuan akhir berupa untuk meningkatkan investasi di daerah, kesempatan kerja, dan memelihara kestabilan ekonomi serta dapat menciptakan distribusi pendapatan yang merata di semua elemen masyarakat (Gupta *et al.* 2005). Teori makro mengenai pengeluaran pemerintah telah banyak dikemukakan oleh para ekonom dan dapat digolongkan kedalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu instrument yang sangat vital dalam mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin (Misdawita & Sari, 2013). Kemiskinan adalah keadaan penduduk kesulitan atau tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal (Anggraeni, *et al.* 2018 dan Purnomo, 2019). Semua negara maju maupun berkembang di seluruh dunia tentu memiliki permasalahan mengenai kemiskinan, tak terkecuali indoneia. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sumatra Utara pun juga mengalami kemiskinan yang jika tidak segera disikapi, dikhawatirkan berdampak terhadap pembangunan daerah (Mardiana *et al.*, 2018). Oleh Karena itu pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi dalam menciptakan kesempatan kerja guna dapat menyerap pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin (Purnomo, 2021 dan Purnomo *et al.*, 2021).

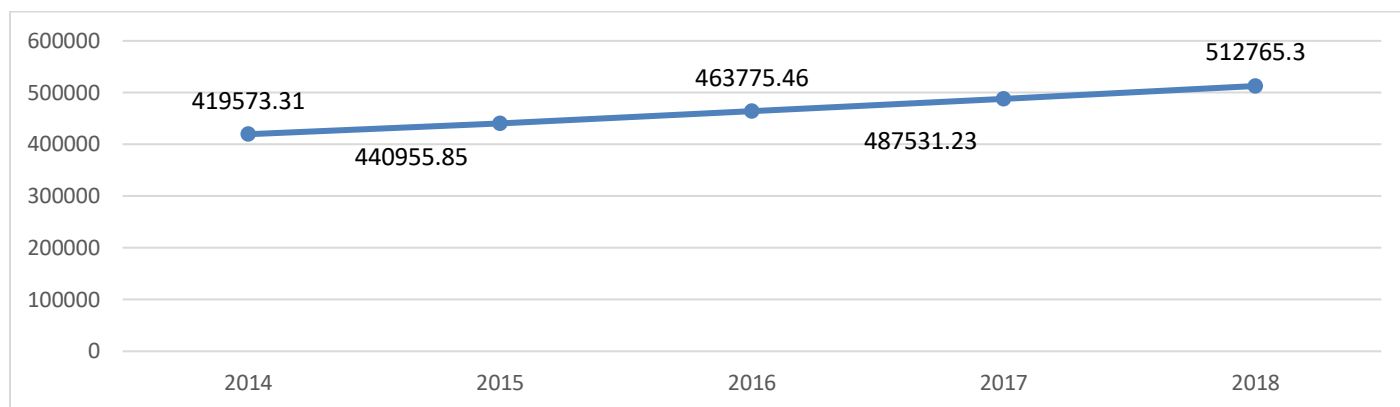


Gambar 1

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dalam, ribuan jiwa 2009-2019

Sumber: data olahan

Grafik diatas dapat perhatikan bahwa Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan penduduk miskin yang cukup signifikan pada bulan maret 2014 sebesar 1,28 juta jiwa dari bulan september 2013 sebesar 1,41 juta jiwa. Tetapi pada tahun berikutnya yaitu bulan september 2015 Sumatera Utara mengalami peningkatan penduduk miskin yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,50 juta dari bulan maret 2014 sebesar 1,28 juta jiwa. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016-2019 sumatera utara mengalami penurunan penduduk miskin. Menurut Badan Pusat Statistik 2019 Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi yang berada pada peringkat ke lima dari sepuluh provinsi miskin di pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara juga merupakan provinsi ke empat dengan jumlah penduduk terbesar di indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.



Gambar 2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Miliar Rupiah), 2014-2018

Sumber: data olahan

Gambar 2 menunjukkan terhitung tahun 2014, Provinsi Sumatra Utara memiliki tingkat perkembangan PDRB yang terus meningkat stabil, tetapi keadaan tersebut bukan merupakan gambaran keadaan secara merata di seluruh wilayah kabupaten Kota. Namun demikian ada beberapa daerah di provinsi Sumatra Utara yang memiliki PDRB yang cukup besar dan kecil. Sebagai contoh Kabupaten Deli Srdang pada tahun 2018 memiliki nilai PDRB yang tergolong besar. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kegiatan ekonomi yang didukung dengan infrastruktur yang baik, seperti adanya Bandar Udara Internasional Kualanamu. Sementara itu, daerah yang memiliki nilai PDRB yang tergolong rendah adalah Kabupaten Pakpak Barat, hal ini disebabkan karena kegiatan perekonomian berupa kegiatan produksi tergolong rendah. Namun di setiap daerah dari tahun 2014 - 2018 PDRB selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi ada beberapa daerah yang memiliki perbedaan yang jauh. Jika ini masih terus berlanjut, maka tingkat kemiskinan akan semakin membengkak yang dapat menyebabkan menurunnya kinerja pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Apabila perbedaan atau gap tersebut berjalan terus-menurun maka jumlah penduduk miskin akan semakin bertambah semakin banyak. Oleh karena itu, untuk menekan jumlah penduduk miskin, pemerintah daerah dan pusat harus berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal dari pusat ke daerah dapat digunakan untuk kebijakan yang tepat sasaran. Setiap daerah akan mendapatkan transfer dari pemerintan untuk kegiatan pembangunan, dimana setiap daerah mendapatkan jumlah anggaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya transfer dari pusat ke daerah tersebut diharapkan ruang gerak fiskal daerah semakin luas dan membaik, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, sehingga jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang (Barus, 2016).

Penelitian dari (Prakoso *et al.* 2019) menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian (Asmara & Cahaya, 2014) yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal ini menggambarkan kebijakan kemandirian keuangan tidak selalu mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan diberbagai daerah, keadaan serupa juga ditemukan pada kebijakan desentralisasi fiskal dan pengeluaran pemerintah, seperti yang terlihat dari hasil penelitian dari Barus, (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang berbeda dengan hasil penelitian (Kawulur *et al.* 2019) yang menunjukkan pengaruh. Untuk variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, hasil penelitian dari (Ketaren, 2018) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan (Misdawita & Sari, 2013) menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasar review dari sebagian hasil penelitian terdahulu, tercermin bahwa efektifitas kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Fenomena pergerakan tingkat kemiskinan yang tidak stabil dari tahun 2010 sampai 2019, sementara dilain pihak PDRB bergerak terus meningkat stabil, akan dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara, selain itu hasil penelitian dari beberapa peneliti yang sudah ada, menunjukkan keberagaman hasil dari variabel desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dampak kemampuan keuangan daerah terhadap penurunan kemiskinan Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara 2010-2019.

METODE

Penelitian ini berjenis kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan sampel semua kabupaten/kota yaitu sebanyak 33. Jenis data yang digunakan adalah penelitian data sekunder dan diperoleh

dari sumber-sumber terkait Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan dalam penelitian ini berumbur dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe data panel. Data panel adalah gabungan dari data *cross section* dan *time series* (Gujarati & Porter, 2009). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pendekatan data panel. Metode tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, kemandirian fiskal, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Adapun persamaan regresi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1DF_{it} + b_2KD_{it} + b_3PP_{it} + e$$

Keterangan: Y = Kemiskinan; DF = Desentralisasi Fiskal; KD = Kemandirian Keuangan Daerah; PP = Pengeluaran Pemerintah; α = koefisien Intercept; $b_{1,2,3}$ = koefisien regresi; i = *cross section*; t = *time series*; e = *error term*

Regresi data panel memiliki 3 output yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Namun dari hanya satu model yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu output regresi harus lolos uji asumsi klasik. Uji tersebut bertujuan agar output regresi yang terpilih memiliki sifat *Best Linear Unbiased Estimator*. Uji tersebut meliputi uji multikolineritas dan heteroskedastisitas, normalitas serta autokorelasi (Gujarati & Porter, 2009).

HASIL

Tabel 1

Hasil Estimasi Dengan Fixed Effects Models (FEM)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	43647,08	67,96773	0,0000
RKKD	-0,003353	-0,272707	0,7853
DDF	-0,006030	-0,294897	0,7683
PPK	-0,011932	-2,990468	0,0030
R-squared	0,990465		

Sumber: data olahan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,003353 dan nilai probabilitas 0,7853 yang lebih besar dari alpha 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini mendukung penelitian Khairudin, *et al* (2019), Suryanta (2019), Suartini (2020), Norsain & Rofik (2022). Tingkat kemandirian keuangan di Sumatera Utara masih dalam kriteria kurang dengan pola hubungan dengan Pemerintah Pusat yang bersifat “instruktif”. Kemandirian keuangan daerah merupakan cerminan dari seberapa mampu daerah melakukan otonomi daerah, namun peranannya masih belum dapat menurunkan kemiskinan (Mizkan, *et al.*, 2015). Norsain & Rofik (2022) menambahkan persoalan kemiskinan di Sumatera Utara adalah perihal ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemandirian keuangan daerah tidak menjadi indikator keberhasilan ekonomi di daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah belum tentu menyentuh masalah kesempatan dan peluang kerja yang luas di daerah tersebut yang pada gilirannya akan mengatasi masalah ketidakcukupan pendapatan.

Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,006030 dan nilai probabilitas sebesar 0,7683 yang lebih besar dari alpa 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini mendukung penelitian dari Maulana & Masbar (2018), Adriawan, *et al.*, (2022). Menurut Rotinsulu, *et al* (2019) tidak signifikannya pengaruh dari desentralisasi fiskal dapat disebabkan karena program pemerintah daerah dari hasil pengelolaan keuangan daerahnya berorientasi pada jangka menengah atau panjang, sehingga hasil dari berbagai upaya pembangunan ini belum langsung terlihat termasuk penurunan angka kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (PPK) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,011932 dan nilai probabilitas sebesar 0,0030 yang lebih kecil alpha 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (PPK) berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Apabila dimaknai lebih dalam maka hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah terhadap bidang kesehatan dinilai berhasil meningkatkan taraf hidup dan harapan hidup penduduknya. Kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan karena kesehatan merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas seseorang. (Hatta, 2018). Apabila kualitas kesehatan penduduk suatu daerah membaik yang dapat dilihat dari indikator angka harap hidup yang tinggi, maka penduduk dikawasan tersebut memiliki masa kerja yang lebih panjang dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan, sehingga angka kemiskinan pada daerah tersebut akan berkurang secara signifikan (Purnomo *et al*, 2021). Kolawole *et al.* (2015) dalam penelitiannya menjumpai bahwa kenaikan jumlah dalam pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dapat membantu upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil estimasi diatas diperkuat oleh Penelitian

(Ketaren, 2018) dimana Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan (PPK) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2000-2016.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dapat di simpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) memberikan pengaruh tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan (PPK) memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan cara menambah fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang penduduknya masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti nias utara dan nias bharat, meningkatkan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat miskin dan juga perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan asuransi kesehatan seperti pelayanan yang diberikan rumah sakit umum daerah terhadap peserta BPJS dan optimalisasi pengelolaan BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. 2022. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan. In *Forum Ekonomi* 24(1), 226-234.
- Anggraeni, E. Y., Huda, M., Maselena, A., Safar, J., Jasmi, K. A., Mohamed, A. K., N, A. 2018 Poverty level grouping using SAW method. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(2), 218-224. doi:DOI: 10.14419/ijet.v7i2.27.11948
- Asmara, A., & Cahaya, S. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1), 41-53.
- Aulia, N. 2014. Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 327-336.
- Barus, R. A. 2016. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Undergraduate Thesis*. Universitas Sumatra Utara.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. 2019. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163
- Gujarati, D. N., & Porter., D. C. 2009. *Basic econometrics 5th ed*. New York, NY, 10020, United States: Douglas Reiner.
- Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E., & Mulas-Granados, C. 2005. Fiscal policy, expenditure composition, and growth in low-income countries. *Journal of International Money and Finance*, 24(3), 441-463. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2005.01.004>
- Hatta, M. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Wilayah Ajatappareng. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 39-48.
- Ketaren, I. C., 2018, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Humaniora dan Pendidikan (QSinastekmapan)* 1, 92-103).
- Kamaroellah, R. A. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123-138.
- Kawulur, S., Koleangan, R. A., & Wauran, P. C., 2019, Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(2), 107-117.
- Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia., 2014, <https://otda.kemendagri.go.id/>. Retrieved January 20, 2020, from <https://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Perppu-Nomor-2-Tahun-2014.pdf>
- Khairudin, K., Tarmizi, R., Indrayenti, Aminah, & Muhammad, K. 2019. Financial Performance of Local Government and Social Welfare: The Case in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research, Special Issue 1*, 168-172.
- Kolawole, B. O., Omobitan, O. A., & Yaqub, J. O. 2015. Poverty, inequality and rising growth in Nigeria: Further empirical evidence. *International Journal of Economics and Finance*, 7(2), 51-62.
- Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. 2018. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 50-60.
- Maulana, I., & Masbar, R. 2018. Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 80-88.
- Misdawita, & Sari, A. A. 2013. Analysis of the Impact of Government Spending on Health, Education, and Subsidy to Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), 147 - 161.

- Mizkan, H., Kamaliah, K., & Agusti, R. 2015. Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di kota pekanbaru. *Sorot*, 10(1), 114-130.
- Norsain, N., & Rofik, M. 2022. Apakah Kinerja Keuangan Daerah Menggambarkan Kemiskinan di Jawa Timur. *Media Mahardhika*, 20(2), 405-414.
- Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. 2019. Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 87-100.
- Putra, R., & Hidayat, S. 2016. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243-256.
- Purnomo, S. D. 2019. Determinan kemiskinan di provinsi daerah istimewa yogyakarta. *Forum Ekonomi*, 21 (2), 217-225. DOI: <http://dx.doi.org/10.29264/jfor.v21i2.5171>
- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Imiah Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 10-19.
- Purnomo, S. D. 2021. Analysis of Labor Absorption in Central Java Province. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 240-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.311>
- Rotinsulu, D. C., Tenda, A. R., & Leonufina, L. M. 2019. Analisis Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(3) 1-22.
- Suartini, S. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Inovasi*, 17(2), 195-202 <https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.230>
- Sudewi, N. N. A., & Wirathi, I. G. A. P. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3), 135-141.
- Suryanta, S. 2019. Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan di Kota Depok. *Cakrawala Management Business Journal*, 2(2), 372-389.